

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang dan damai merupakan isu tradisional dalam kajian hubungan internasional yang masih menjadi perhatian banyak masyarakat. Menurut data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) konflik telah meningkat signifikan secara jumlah sejak tahun 2010.¹ Pada tahun 2015 jumlah konflik yang sedang berlangsung berada pada angka 50 yang jumlah ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.² Mayoritas konflik terjadi di kawasan Timur Tengah dengan jumlah terbanyak, diikuti oleh beberapa kawasan lainnya seperti Afrika dan Asia. Jeremy Bentham dalam tulisannya *A Plan for An Universal and Perpetual Peace* mengatakan bahwa negara dan properti merupakan dua sumber utama terjadinya permasalahan dalam dunia internasional.³

Konflik menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dalam melihat kondisi internasional. Menurut pandangan kaum realis, Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nation* tatanan internasional selalu berada pada kondisi anarki dan konflik.⁴

¹ Marc Alexander, *Conflict and Violence in the 21st Century Current Trends As Observed in Empirical Research and Statistic*, World Bank Group, <http://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2016/01/Conflict-and-violence-in-the-21st-century-Current-trends-as-observed-in-empirical-research-and-statistics-Mr.-Alexandre-Marc-Chief-Specialist-Fragility-Conflict-and-Violence-World-Bank-Group.pdf> pada (11/30/2017, 03.04)

² *Ibid.*

³ Gunhild Hoogensen, 2005, *International Relations, Security and Jeremy Bentham*, New York: Routledge, Hal.105

⁴ Hans Joach Morgenthau, 1948, *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*, McGraw-Hill, hal.15

Diez dalam bukunya *Europe's Others and the Return of Geopolitic* mencoba untuk mendeskripsikan pengertian dari konflik. Menurutnya “konflik” adalah suatu perselisihan antara dua orang atau kelompok yang memperjuangkan kebutuhan, ide, nilai atau tujuan tertentu.⁵ Sehingga, konflik akan menjadi sebuah permasalahan yang kompleks ketika solusi yang ada menjadi atribut politik untuk mewujudkan kepentingan suatu negara.

Konflik Palestina-Israel merupakan satu dari banyaknya konflik global yang tengah terjadi. Isu ini telah berkembang secara luas ketika kedua belah pihak merasa berdaulat akan wilayahnya. Salah satu latar belakang terjadinya konflik Palestina-Israel yakni terkait masalah pemukiman yang telah terjadi sejak tahun 1948. Ketika wilayah tersebut masih dikuasai oleh kolonialisme Inggris sejak saat itu sudah terdapat ketegangan antara bangsa keturunan Arab dan Yahudi.⁶ Memahami perpecahan antara dua identitas yang berseteru, pada akhirnya PBB memutuskan untuk memisahkan dua bangsa tersebut ke dalam dua wilayah yang berbeda.⁷ Israel menerima wilayah yang telah ditentukan PBB dan bahkan mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun yang sama. Sebaliknya, bangsa Arab melihat hal ini sebagai bentuk kolonialisme lain dari bangsa Inggris dan pengkhianatan dari komunitas internasional. Keputusan

⁵ Thomas Diez et. al, 2007, *Conflict and Human Right: A Theoretical Framework*, Six Framework Program, Working Paper 6, University of Birmingham, Hal. 2. Sumber dari <http://shur.luiss.it/files/2008/10/shurwp01-07.pdf> pada (11/27/2017, 10.09)

⁶ Yaacov Bar-Siman-Tov, 2014, *Justice and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict*, New York: Routledge, hal. 48

⁷ Beinun & Hajjar, 2016, *Palestine Israel and the Arab-Israeli Conflict A Primer*, Middle East Research & Information Project, hal. 4 sumber dari https://web.stanford.edu/group/sper/images/Palestine-Israel_Primer_MERIP.pdf pada (11/24/2017, 08.42)

tersebut pada akhirnya membawa Palestina untuk mendeklarasikan perang dengan bangsa Israel.⁸

Perang yang terjadi malah menjadikan wilayah perbatasan yang telah ditentukan PBB pada resolusi 181 bergeser. Garis pemisah bertahan hingga tahun 1967 ketika Israel mendeklarasikan perang 6 hari dan memenangkannya kembali.⁹ Kemenangan ini bukan hanya berimplikasi bagi pihak pemerintah namun juga secara agama.¹⁰ Pada akhirnya kedua pemerintah setuju bahwa garis pemisah yang ada tidaklah berfungsi sedemikian mestinya, maka diperlukannya negosiasi-negosiasi baru yang jelas. Ketika para elit politik berdiskusi terkait garis pemisah antara Palestina dan Israel. Masyarakat Israel berinisiasi untuk pindah ke wilayah Palestina di kawasan Tepi Barat dan Gaza, tanpa adanya izin yang jelas dengan jumlah yang sangat masif. Masyarakat ini mulai membangun pemukimannya sendiri di kawasan Palestina. Melihat kesuksesan dari pembangunan pemukiman yang dilakukan masyarakat Israel, pemerintah lalu mengadopsi tindakan ini sebagai kegiatan yang terinstitusi.

Berbagai negosiasi telah diupayakan untuk menyelesaikan masalah pemukiman. Seperti perjanjian Oslo pada tahun 1990 yang memberikan hak terhadap Palestina untuk mengelola pemerintahannya sendiri pasca akuisisi militer Israel. Perjanjian-perjanjian yang telah ditanda tangani belum mampu menyelesaikan masalah

⁸ *Ibid.*, hal.5

⁹ John Quigley, 2013, *The Six-Day War and Israeli Self-Defense Questioning the Legal Basis for War Preventive*, New York: Cambridge University Press, hal. 1

¹⁰ *Ibid.*, hal. 12

pemukiman. Hingga pada tahun 2016 terdapat sekitar 570.000 pemukim Israel yang mendiami wilayah Tepi Barat.¹¹

Memahami masalah utama dari konflik Palestine-Israel, menjadi hal yang penting untuk melihat latar belakang permasalahan dari berbagai perspektif. Beberapa mengaris bawahi bahwa konflik ini merupakan implikasi dari masalah perbedaan teologi dan motif politik.¹² Dengan bantuan dari negara barat seperti Amerika Serikat, Israel mampu berkembang lebih pesat.¹³ Pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer dan posisi internasional yang dimiliki mampu menjadi faktor pendorong untuk mencapai tujuannya dalam melakukan misi pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina.

Komunitas internasional telah bekerja keras untuk menciptakan perdamaian di wilayah tersebut. PBB sebagai simbol perdamaian dunia telah mengkaji isu tersebut sebanyak empat kali pada sidang Majelis Umum. Pada sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah melakukan diskusi terkait isu yang sama lebih dari 100 kali pasca partisi tahun 1947.¹⁴ Jumlah yang tidak sedikit namun hasil dari resolusi belum mampu mengakomodasi untuk terselesainya konflik. Hal ini yang

¹¹ *Israel Setuju Pembangunan Pemukiman Baru di Palestina*, BBC, 2016 sumber http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160901_dunia_israel_pemukiman pada (11/9/2017, 07.50)

¹² *Hajjar & Beinir, Op.cit., hal. 1*

¹³ Devon Douglas-Bowers, 2013, *The U.S Role In The Israeli-Palestinian Conflict*, Foreign Policy Journal, sumber dari <https://www.foreignpolicyjournal.com/2013/12/02/the-u-s-role-in-the-israeli-palestinian-conflict/> pada (12/12/2017, 12.02)

¹⁴ Habib Mohamed, *List of United Nations Resolutions Concerning Israel/Palestine* sumber dari http://www.icarabe.org/.../a_historia_da_palestina_-list_of_united... (11/21/2017, 21.09)

menjadikan posisi PBB dipertanyakan terkait keterpihakannya sebagai organisasi perdamaian global.

Selain PBB negara Amerika Serikat mengambil peran besar dalam konflik Palestina-Israel. Keterlibatan Amerika Serikat tidak terlepas dari realita hubungan bilateral kedua negara. Hubungan Amerika Serikat dan Israel merupakan hubungan yang mampu di kategorikan sebagai hubungan krusial. Kedekatan antara keduanya merupakan pengejawantahan dari kebutuhan yang keduanya perlukan. Banyak kesepakatan yang telah ditanda tangani pada banyak isu antara lain, *sharing intelligence*, militer, ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang semakin harmonis.¹⁵ Hubungan keduanya semakin kuat ketika kedua negara tersebut merupakan negara pemegang nilai demokrasi yang menjadi landasan dan pedoman tertinggi dalam negara.¹⁶

Sejak awal Israel mendeklarasikan sebagai sebuah entitas negara, Amerika Serikat sudah menunjukkan ketertarikannya dan menandai bahwa Amerika merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Israel secara *de facto*.¹⁷ Kebijakan yang

¹⁵ Michael B Oren, 2008, *Israel and the United States: The Special Bond Between Two Nations and Two Peoples*, Wall Street Journal, sumber dari http://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Israel60/ch10.pdf pada (11/24/2017, 09.45)

¹⁶ *Ibid.*, 125

¹⁷ *Ibid.*, hal. 124

dibuat oleh negara Amerika Serikat berkomitmen untuk membantu negara Israel yang tertuang dalam Kongres ditunjukkan dengan berbagai kerjasama.¹⁸

Melihat kedekatan hubungan Amerika Serikat dengan Israel, menjadi hal yang jelas apabila Amerika menjadi salah satu aktor penting yang terlibat dalam konflik Palestina-Israel. Terlebih lagi kebijakan luar negeri negara Amerika Serikat yang berpihak pada negara Israel atas dasar kerjasama-kerjasama yang mereka tandai. Sikap berbeda ditunjukkan Amerika dalam sidang DK PBB yang diselenggarakan pada 23 Desember 2016. Sidang tersebut mendiskusikan terkait permasalahan pembangunan pemukiman bangsa Yahudi di teritori Palestina. Pertama kalinya Amerika Serikat tidak melakukan veto ketika negara aliansinya terpojok oleh komunitas internasional.¹⁹ Ini juga menjadi sebuah keputusan yang berbeda melihat pada tahun 2011 Amerika Serikat memutuskan untuk memveto draf resolusi terkait kasus yang sama. Isu ini menjadi hal yang menarik untuk dianalisa untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi sikap abstain Amerika Serikat dalam sidang DK PBB, ketika melihat hubungan kedua negara berjalan dengan baik.

¹⁸ I Putu Yahya Priyatna, *Strategi AIPAC Dalam Menjaga Keberlanjutan Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Untuk Israel Tahun 2009-2013*, PKP, Vol 1, No 2, Bali: OJS Unud sumber dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/9773> pada (29/9/2017, 10.10)

¹⁹ Stephen Collinson, et al, 2016, *US abstains as UN demands end to Israel Settlements*, CNN, sumber dari <http://edition.cnn.com/2016/12/23/politics/israel-official-rips-obama-un-settlements/index.html> (11/15/2017. 07.45)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengidentifikasi poin utama yang dijadikan sebagai rumusan masalah yakni **“mengapa Amerika Serikat abstain dalam sidang DK PBB terkait permasalahan pemukiman pada tahun 2016”**.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah **menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi sikap abstain Amerika Serikat dalam sidang DK PBB terkait permasalahan pemukiman pada tahun 2016**.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kajian hubungan internasional dan diharapkan dapat menjadi rujukan dalam bidang kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan cara berfikir yang berpedoman pada pengetahuan yang empiris. Penulis juga berharap penelitian ini mampu diterima banyak pihak sebagai kontribusi dalam kajian kebijakan luar negeri.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan serta pembandingan dalam melihat posisi penulis dalam meneliti sikap abstain Amerika Serikat dalam Sidang DK PBB tahun 2016.

Penelitian pertama berjudul **"Tersendat-sendatnya Pemulihan Damai antara Palestina dan Israel di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu".**²⁰ Penelitian ini merumuskan masalah mengenai perundingan damai Palestina dan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang stagnan. Dengan menggunakan konsep kebijakan publik dan konflik resolusi skripsi ini menghasilkan penjelasan terkait alasan tersendatnya tujuan damai. Pemerintahan Netanhayu yang dianggap berorientasi besar dalam mewujudkan cita-

²⁰ Ria Almayrissa Suzan Silaban, 2011, *Tersendat-sendatnya pemulihan damai antara Palestina dan Israel di bawah pemerintahan Perdana Mentri Benjamin Netanyahu*, skripsi, Jurusan Hubungan Internasional Univ. Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, sumber <http://repository.upnyk.ac.id/925/1/NEWWWW.pdf> pada (4/11/2018, 10.16)

cita gerakan Zionisme untuk menciptakan “tanah yang dijanjikan” untuk masyarakat Yahudi di wilayah Palestina. Netanyahu juga mendapatkan dukungan dari partai sayap kanan di Israel ditambah keinginan besar pemukim Yahudi mampu memposisikan perundingan damai semakin pesimistis. Manuver-manuver Israel bertujuan untuk mewujudkan “Greater Israel” dengan melakukan berbagai okupasi wilayah Palestina.

Penelitian pertama memiliki persamaan dengan penelitian penulis terletak pada kajian besar yang diambil yakni melihat perkembangan konflik Palestina-Israel. Perbedaan terletak pada objek khusus dan alat analisa yang digunakan. Objek penelitian pertama terfokus pada analisa perkembangan konflik yang dianggap stagnan di bawah kepemimpinan Netanyahu. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada analisis kebijakan Amerika Serikat terkait konflik.

Penelitian kedua merupakan skripsi yang berjudul "**Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Palestina Melalui United States Security Coordinator (USSC) periode 2005-2012**".²¹ Tulisan ini menekankan pada analisa kebijakan Amerika Serikat terhadap konflik Palestina-Israel melalui *United States Security Coordinator* (USSC). Teori dan konsep yang digunakan pada skripsi ini adalah teori realisme, teori kebijakan luar negeri, konsep bantuan luar negeri dan konsep kepentingan nasional. Teori dan konsep digunakan untuk melihat alasan dibalik

²¹ Khalisotussurur, 2013, *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Palestina Melalui United States Security Coordination*, Skripsi, Jursuan Hubungan Internasional Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Sumber <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24163> pada (4/11/2018, 10.02)

terbentuknya USSC yakni untuk menahan pergerakan terorisme, kepentingan ekonomi dan politik, melemahkan Hamas dan memperkuat Fatah. Skripsi ini juga menjelaskan efektivitas dari USSC yang dianggap tidak cukup mampu mewujudkan visi dan misinya. Permasalahan pertama tidak ada ruang bagi negara Palestina untuk memenuhi kebutuhan pribadi Palestina, kedua USSC tidak mendapatkan respons positif dan tidak mampu membentuk kepercayaan warga Palestina, terakhir pelatihan yang dilakukan USSC di wilayah Palestina malah menjadikan ketidak stabilan politik.

Persamaan penelitian penulis dari penelitian kedua terdapat pada topik besar yang dikaji yakni kebijakan Amerika Serikat pada konflik Palestina-Israel. Perbedaan terletak pada objek dan teori yang digunakan. Penelitian diatas mengkaji kebijakan Amerika Serikat terhadap Palestina-Israel melalui USSC. Sedangkan objek khusus penelitian penulis terfokus pada mengkaji kebijakan abstain Amerika Serikat terkait konflik Palestina-Israel dalam sidang DK PBB tahun 2016.

Penelitian ketiga merupakan jurnal yang berjudul **“Reinterpreting the Israeli-Palestinian Conflict: A Constructivism Theory of Understanding a Cross-Ethnic Phenomena”**.²² Tulisan berupa jurnal ini menggunakan pendekatan konstruktivis sebagai alat analisa yang digunakan. Diperoleh hasil bahwa permasalahan Palestina-Israel tidak dapat dipisahkan dari fakta dua identitas yang berbeda baik itu dari bahasa,

²² Mehrzad, et al, 2015, *Reintrepreting the Israeli-Palestinian Conflict: A Constructivism Theory of Understanding A Cross-Ethnic Phenomena*, Jurnal, Vol. 11 No. 16, Canadian Centre of Science and Educational, sumber https://www.researchgate.net/publication/278400014_Reinterpreting_the_Israeli-Palestinian_Conflict_A_Constructivism_Theory_of_Understanding_a_Cross-Ethnic_Phenomena pada (4/11/2018, 10.46)

norma, dan agama. Kedua negara saling merasa terancam akan identitas lain di wilayah tersebut maka perlu adanya tindakan untuk menghalanya. Kondisi ini melahirkan konflik yang tidak berkesudahan, menciptakan pola hubungan yang penuh akan ketegangan.

Persamaan penelitian terdapat pada kajian terkait sejarah konflik Palestina-Israel. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus pembahasan dimana penelitian kedua lebih memfokuskan pada menjelaskan terkait terciptanya konflik. Penelitian penulis terfokus pada salah satu kebijakan Amerika dalam konflik Palestina-Israel. Teori yang digunakan dalam penelitian diatas menggunakan teori konstruktivisme. Penelitian penulis menggunakan *Determinant of Foreign Policy* dan juga Konsep Peranan Nasional sebagai alat analisa yang digunakan.

Penelitian keempat berjudul **“Signifikansi Negosiasi Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina”**.²³ Skripsi ini menggunakan konsep konflik dan juga negosiasi yang mampu menjawab rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konflik panjang antara Israel tidak terlepas dari permasalahan pemukiman dan beberapa kejadian historis yang terjadi di kawasan tersebut. Upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi bilateral atau dengan adanya bantuan pihak ketiga belum mampu menghasilkan perjanjian yang jelas. Terdapat beberapa perjanjian yang berhasil seperti Oslo Accord tidak sedikit negosiasi yang dilakukan berujung

²³ Siti Marwah, 2012, Signifikansi Negosiasi Dalam Penyelesaian Konflik Palestina Israel, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional Univ. Hasanuddin, sumber <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1474> pada (4/11/2018, 9.55)

gagal dan berstatus *quo* seperti halnya terkait perjanjian pemberhentian pembangunan pemukiman.

Penelitian keempat memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada salah satu objek peran negosiasi untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Perbedaan penulis dengan penelitian keempat terletak pada fokus kajian yang dibahas. Penelitian keempat menekankan pada upaya dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik yang menorehkan kesuksesan dan kegagalan. Penelitian penulis memfokuskan pada sikap abstain Amerika Serikat pada upaya negosiasi konflik dalam sidang DK PBB.

Penelitian kelima merupakan skripsi yang ditulis oleh Mohammad Miqdad yang berjudul **Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Israel Pada Masa Pemerintahan Barack Obama.**²⁴ Skripsi ini merupakan tulisan deskriptif yang menggunakan konsep kepentingan nasional dan juga kebijakan luar negeri sebagai alat analisa yang digunakan. Diperoleh hasil terkait arah kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama terhadap Israel terkait beberapa isu seperti politik, ekonomi, dan keamanan. Kebijakan keamanan Amerika terfokus pada isu terorisme, pengembangan nuklir Israel dan penguatan pertahanan Israel Amerika di kawasan Timur Tengah melalui program *Security Assistance Memorandum of Understanding*. Kebijakan terkait ekonomi terfokus pada pengembangan teknologi dan bantuan luar negeri berupa *charitable giving*.

²⁴ Mohammad Miqdad, 2018, *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Israel Pada Masa Pemerintahan Barack Obama*, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional Univ. Muhammadiyah Malang.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada tema besar yakni kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel di bawah kepemimpinan Barack Obama. Penelitian penulis dan penelitian terakhir memiliki perbedaan pada tema khusus yang dibahas. Penelitian terakhir memfokuskan pada arah kebijakan Obama terkait berbagai isu seperti ekonomi dan keamanan terhadap negara Israel. Penelitian penulis menekankan pada kebijakan Obama terkait sikap abstain dalam sidang DK PBB yang mengecam tindakan ilegal pembangunan pemukiman Israel.

Dapat disimpulkan bahwa kelima penelitian terdahulu memiliki benang merah persamaan objek besar yang dikaji yaitu kebijakan Amerika Serikat dalam konflik Palestina-Israel. Perbedaan yang menjadikan penelitian penulis orisinil yakni menekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi sikap abstain Amerika Serikat dalam Sidang DK PBB pada tahun 2016 tentang permasalahan pemukiman Yahudi di kawasan Palestina.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1	Ria Almayrissa Suzan Silaban, dengan judul <i>"Tersendat-sendatnya pemulihan damai antara Palestina dan Israel dibawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu"</i>	Eksplanatif Konsep Kebijakan Publik, Resolusi Konflik	Penjelasan terkait alasan tersendatnya tujuan damai Palestina-Israel dikarenakan Israel lebih terfokus untuk mencapai tujuan kelompok Zionis dengan merebut wilayah Palestina dan

			pertumbuhan penduduk yang semakin banyak.
2	Khalisotussurur dengan judul <i>"Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Palestina Melalui United States Security Coordinator (USSC) Periode 2005-2012"</i>	Eksplanatif Perspektif Realisme, Teori Kebijakan Internasional, Konsep bantuan luar negeri, konsep kepentingan nasional	<p>Alasan terbentuknya USSC untuk menahan pergerakan terorisme, kepentingan ekonomi dan politik, melemahkan Hamas dan memperkuat Fatah.</p> <p>Permasalahan terkait efektifitas USSC. Pertama tidak ada ruang bagi negara Palestina untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kedua USSC tidak mendapatkan respon positif dan tidak mampu membentuk kepercayaan warga Palestina, selain itu pelatihan yang dilakukan USSC di wilayah Palestina malah menjadikan ketidak stabilan politik.</p>
3	Mehrzhah Et al. Dengan Judul <i>Reinterpreting the Israeli-Palestinian Conflict: A Constructivism Theory of Understanding a Cross-Ethnic Phenomena</i>	Eksplanatif Konstruktivisme	<p>Adanya ancaman dari Imigran Yahudi sejak awal kedatangan</p> <p>Perbedaan identitas</p> <p>Permasalahan sosial menurut konstruktivisme tercipta karena adanya intersubjective antara kedua belah pihak</p> <p>Permusuhan dan perbedaan yang ada dari sebuah identitas yang kontrak pada akhirnya menciptakan suatu konflik yang penuh ketegangan</p>

			Untuk menyelesaikan konflik perlu adanya pembahasan yang signifikan
4	Siti Marwah judul Signifikansi Negosiasi Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel	Deskriptif Konsep Konflik dan Negosiasi	Negosiasi bilateral atau dengan adanya bantuan pihak ketiga belum mampu menyelesaikan konflik. Terdapat beberapa perjanjian yang berhasil seperti Oslo Accord tidak sedikit negosiasi yang dilakukan berujung gagal dan berstatus quo.
5	Mohammad Miqdad berjudul Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Israel Pada Masa Pemerintahan Barack Obama	Deskriptif Kepentingan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri	Terdapat fokus utama arah kebijakan Obama terhadap Israel yakni, Kebijakan keamanan Amerika terfokus pada isu terorisme, pengembangan nuklir Israel dan penguatan pertahanan Israel Amerika di kawasan Timur Tengah melalui program <i>Security Assistance Memorandum of Understanding</i> . Kebijakan terkait ekonomi terfokus pada pengembangan teknologi dan bantuan luar negeri berupa <i>charitable giving</i> .

1.5 Teori dan Konsep

1.5.1 *Determinant of Foreign Policy*

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu instrumen penting di dalam suatu negara untuk mewujudkan kepentingan nasional. Menentukan suatu kebijakan luar negeri yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak memerlukan proses yang panjang dan penuh pertimbangan. Joshua Goldstein dalam bukunya *International Relations* menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan strategi yang diambil oleh suatu negara dalam memposisikan diri pada dunia internasional.²⁵ Dalam perumusan kebijakan Luar Negeri Charles W. Kegley dalam bukunya *World Politics and Transformation* lebih detail menjelaskan setidaknya terdapat tiga faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan yang dikenal *Determinant of foreign Policy* antara lain faktor global, faktor domestik, dan faktor individu.

Faktor Global, faktor pertama meliputi dua aspek yaitu kondisi geopolitik dan pendistribusian *power*. Kondisi geopolitik, kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan kondisi geografis dan *political power* yang ada. Aspek selanjutnya *polarity* dan *polarization*, aspek ini lebih menekankan pada pendistribusian kekuatan dalam kebijakan luar negeri. *Polarity* merujuk pada pendistribusian kekuatan dalam sistem global, yakni melihat bentuk *power* unipolar, bipolar, ataupun multipolar.

²⁵ Joshua Goldstein, 1999, *International Relations*, New York: Longman, hal. 147

Sedangkan *Polarization* lebih menekankan pada kesepakatan dan hubungan negara satu dengan lainnya.²⁶

Faktor domestik, terfokus pada unit dan aspek yang ada pada lingkup internal suatu negara yang mampu berpengaruh dalam penentuan kebijakan luar negeri. Atribut yang dimiliki negara mampu diklasifikasi menjadi tiga aspek diantaranya.²⁷ Kemampuan militer, faktor penting dalam menyikapi perang dan damai. Berdasarkan pandangan kaum realis kemampuan militer merupakan persiapan penting dalam mengetahui posisi negara. Kemampuan ekonomi, Kegley menyatakan semakin kuatnya perekonomian negara akan memengaruhi peranannya dalam dunia internasional terkait politik ekonomi global begitupun sebaliknya. Terakhir adalah tipe pemerintahan, faktor ini merujuk pada sistem pemerintahan, ideologi, struktur politik yang diterapkan dalam suatu negara.²⁸

Faktor Individu, pribadi dari sosok pemimpin pemegang kekuasaan tertinggi negara memengaruhi arah kebijakan yang diambil. Kegley dalam bukunya mengutip tulisan dari Margaret G. Herman dalam bukunya *Leaders, Leadership and Flexibility: Influences on Heads of Government as Negotiators and Mediators* menyatakan setidaknya terdapat 6 faktor yang memengaruhi kebijakan seorang pemimpin. Cara

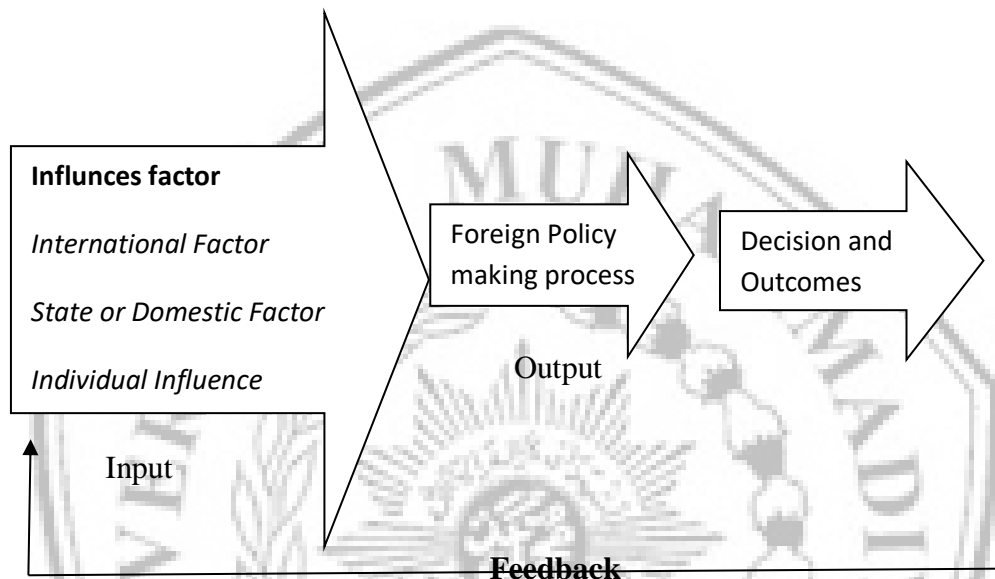
²⁶ Charles W Kegley & Shannon L Blanton, 2010, *World Politics Trend and Transformation*, Boston: Wadsworth Publishing, hal. 215-216

²⁷ *Ibid.*, hal. 218

²⁸ Adam Quinn, 2011, *US Foreign Policy in Context: National Ideology from the Founder Bush Doctrine*, New York: Routledge, hal. 22

pandangan, gaya berpolitik, motif mendapatkan posisi, ketertarikan dalam urusan luar negeri, kondisi saat sebelum memimpin, dan gaya bergaul saat menjabat.²⁹

Bagan 1.1 Faktor Pembentukan Kebijakan Luar Negeri



Operasional konsep *Determinant of Foreign Policy* pada penelitian digunakan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi sikap abstain Amerika Serikat dalam resolusi Nomor 2334 DK PBB. Penulis melihat faktor global dan individu memiliki kecenderungan yang lebih dalam memengaruhi keputusan Amerika terkait isu tersebut. Kondisi internasional yang mampu menekan arah kebijakan luar negeri dan kepemimpinan Barack Obama memiliki implikasi dalam sikap abstain Amerika.

Pada aspek global penulis akan menjelaskan faktor global aspek *polarization* yang akan menekankan pada hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Muslim

²⁹ *Ibid.*, hal.210

dunia. Sedangkan pada aspek individu akan menjelaskan enam faktor karakteristik Presiden Obama dan pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa

Untuk membuat penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang valid dan terarah, level analisa diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini akan memfokuskan pada aktor Negara sebagai unit analisa dan unit eksplanasi. **Unit analisa** dari penelitian ini adalah kebijakan Amerika Serikat terhadap konflik Palestina Israel sedangkan **unit eksplanasi** dari penelitian ini adalah sikap abstain Amerika Serikat dalam sidang DK PBB terkait permasalahan pemukiman. Model dari penelitian ini adalah korelasionis dimana model ini digunakan ketika unit analisa dan unit eksplanasi pada suatu level yang sama.

1.6.2 Metode/Tipe Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian eksplanatif yang menjelaskan terjadinya suatu kejadian secara runtut begitu juga sebab akibat dari suatu kasus. Tipe penelitian eksplanatif juga memiliki sifat menjawab rumusan masalah “mengapa” secara metodologis.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang akan digunakan adalah teknik analisa deduktif. Bersifat teoritik untuk mendapatkan kebenaran akan hipotesa yang telah ditentukan dan penelitian yang telah dilakukan. Teknik ini merupakan teknik analisa data yang bermula dari suatu yang umum (abstraksi) menjadi suatu penelitian yang bersifat khusus (empiris) yang berpedoman pada teori dan hipotesa.³⁰

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data melalui pengadaan sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yakni dengan mempelajari buku-buku, referensi, jurnal, artikel yang bersumber dari media cetak atau media online yang berkaitan tentang isu penelitian.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni pada masa pemerintahan Barack Obama tahun 2009-2017. Pada masa pemerintahan Obama Amerika Serikat mengeluarkan dua kebijakan yang berbeda terhadap permasalahan pemukiman Palestina-Israel dalam sidang DK PBB.

³⁰ Alexander Wendt et al, 2014, *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*, terj. Asrudin et al, Malang: Intrans Publishing, hal. 27

b. Batasan Masalah

Batasan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian adalah alasan dan faktor pendorong sikap abstain Amerika Serikat dalam sidang DK PBB terkait masalah pemukiman Israel di wilayah Palestina. Dengan memfokuskan penelitian pada satu isu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi penelitian yang terarah dan fokus.

1.7 Argumen Utama

Sikap Amerika Serikat untuk tidak mengintervensi permasalahan pemukiman Palestina-Israel pada sidang DK PBB pada 23 Desember 2016 merupakan hal yang jarang dilakukan. Penulis melihat bahwa hal ini mampu dijelaskan dengan adanya beberapa faktor yang memengaruhi sikap tersebut. Pertama faktor global yang terfokus pada dorongan dunia internasional yang menekan Amerika untuk menunjukkan kebijakan yang adil terkait kredibilitasnya sebagai negara mediator dalam konflik. Kedua faktor individu pembuat kebijakan, sikap abstain yang ditunjukkan Amerika merupakan kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Barack Obama. Karakteristik Obama yang berbeda dalam menentukan arah kebijakan Amerika Serikat terhadap negara-negara Muslim dunia menjadi faktor yang memengaruhi sikap abstain.

1.8 Sistematika Penulisan

Table 1.2 Sistematika Penelitian

BAB	ISI BAB
BAB I PENDAHULUAN	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori/ Konsep 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 1.6.2 Metode/ Tipe Penelitian 1.6.3 Teknik Analisa Data 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Argumen Dasar 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II PERAN PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA DAN KETERLIBAT AMERIKA SERIKAT	2.1 Peranan Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Konflik Palestina-Israel 2.2 Dinamika Keterlibatan Amerika Serikat dalam Resolusi PBB 2.2.1 Mediasi Amerika Serikat dalam Konflik Palestina-Israel 2.3 Resolusi Nomor 233
BAB III ANALISA FAKTOR- FAKTOR YANG MEMENGARUHI	3.1 Respon Dunia Internasional terhadap Keterlibatan Amerika Serikat 3.2. Hubungan Amerika dengan Negara Muslim 3.3. Pengaruh Karakteristik Kepemimpinan Obama

SIKAP ABSTAIN AS	
BAB IV PENUTUP	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

